

PENGARUH KOMPLEKSITAS PEMERINTAH, TINGKAT KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN PADA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus pada Laporan Keuangan Seluruh Ibu Kota Provinsi di Indonesia Periode 2016-2017)

***THE INFLUENCE OF GOVERNMENT COMPLEXITY, THE LEVEL OF INDEPENDENCE AND PUBLIC WELFARE TO DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ON THE OFFICIAL WEBSITE OF THE LOCAL GOVERNMENT
(Study Case on Financial Statements of All Provincial Capital Cities in Indonesia for the Period of 2016-2017)***

Deanisa Restuti¹, Sri Rahayu, S.E.,M.Ak., Ak., CA.²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹deanisarestuti@students.telkomuniversity.ac.id ²srirahayu@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan tersebut, sehingga terdapat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menjelaskan tentang keterbukaan informasi. Maka seharusnya pengungkapan informasi laporan keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah merupakan hal yang efektif dan efisien untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 34 provinsi di Indonesia selama dua periode yaitu 2016 -2017, maka didapat 68 sampel laporan keuangan dari setiap provinsi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logistik dengan menggunakan software SPSS versi 25

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial, variabel kompleksitas pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Variabel tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kompleksitas Pemerintah, Tingkat Kemandirian, Kesejahteraan Masyarakat, Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The existence of Law No. 17 of 2003 concerning State Finance requires the central government and regional governments (Pemda) to make financial reports as a form of accountability for the implementation of the APBN and APBD. Along with the accountability of the implementation, so that there is Law No. 14 of 2008 which explains the disclosure of information. Then the disclosure of financial statement information on the official website of the local government is an effective and efficient thing to do. This study aims to examine the effect of government complexity, degree of independence and public welfare on the disclosure of financial information on the official website of the local government.

This research uses quantitative methods. The sampling technique in this study is saturated sample. The sample in this study is the financial statements of 34 provinces in Indonesia for two periods, 2016-2017, obtained 68 samples of financial statements from each province. The data analysis model used in this study is logistic analysis using SPSS software version 25.

The results showed that the complexity of the government, the level of independence and welfare of the people simultaneously had a significant effect on the disclosure of financial statements on the official website of the local government. While partially, the government complexity variable has a significant positive effect on the disclosure of financial statements on the official website of the local government. Variable level of independence and public welfare does not affect the disclosure of financial statements on the official website of the local government.

Keywords : Government Complexity, Level of Independence, Public Welfare, Disclosure of Financial Information on Local Government Official Websites

1. Pendahuluan

Indikator publik yang baik yaitu pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Salah satu bentuk tanggungjawab dan transparansi pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan menyampaikan informasi penggunaan sumber-sumber daya dalam bentuk informasi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah^[11]. Pengungkapan informasi laporan keuangan penting untuk dilakukan dikarenakan akan menggambarkan tentang perbedaan praktik pengungkapan yang telah dilakukan oleh entitas pemerintah daerah, kondisi pemerintah daerah pada periode berjalan, serta faktor penting sebagai pencapaian efisiensi dan sarana akuntabilitas^[6]. Penggunaan internet yaitu melalui *website* resmi pemerintah daerah merupakan salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam melakukan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), karena biaya yang dikeluarkan akan lebih ekonomis^[3]. LKPD terdiri dari tujuh komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)^[7].

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga faktor yaitu kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Sampel penelitian ini adalah informasi keuangan 34 provinsi yang ada di Indonesia selama dua tahun yaitu 2016 -2017. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh secara simultan dan parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

A. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada *Website* Resmi Milik Pemerintah Daerah

Kompleksitas dalam pemerintah dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung^[9]. Berikut rumus untuk menentukan Kompleksitas Pemerintah sebagai berikut:

$$\text{Kompleksitas Pemerintah} = \text{Ln jumlah penduduk Ibu Kota Provinsi di Indonesia} \quad (2.1)$$

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap^[11]. Dengan banyaknya penduduk yang di suatu daerah maka semakin tinggi kompleksitas pemerintah daerah yang ada sehingga semakin tinggi pengungkapan informasi keuangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikarenakan tujuan dari pembuat laporan keuangan yaitu untuk para penggunanya, salah satu pengguna laporan keuangan adalah masyarakat atau penduduk di suatu daerah. Dengan demikian kompleksitas pemerintah sangat berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh^[4] yang menyatakan bahwa Kompleksitas Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

H₂ : Kompleksitas Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *website* resmi pemerintah daerah.

B. Pengaruh Tingkat Kemandirian Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada *Website* Resmi Milik Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian daerah adalah kemampuan sebuah daerah untuk melaksanakan pemerintahannya^[8]. Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi^[10]. Berikut rumus untuk menentukan Tingkat Kemandirian sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Semangkin tinggi tingkat kemandirian daerah, maka pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah akan tinggi juga. Karena semangkin tinggi tingkat kemampuan daerah yang dihasilkan, maka dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja kerja yang tinggi dapat menandakan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Pengungkapan pun akan dilakukan agar publik mengetahui dan mempercayai hasil kinerja yang telah dilakukan sudah baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ^[3] yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

H₃ : Tingkat Kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi pada *website* resmi pemerintah daerah

C. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada *Website* Resmi Milik Pemerintah Daerah

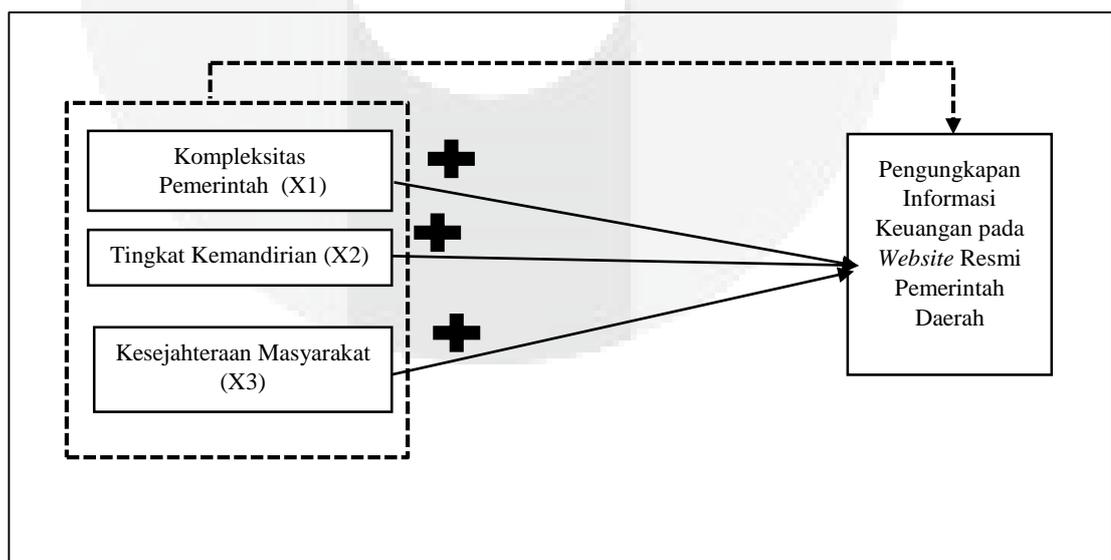
Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan pendapatan perkapita, hal tersebut dikarenakan dengan masyarakat yang produktif maka pendapatan perkapita masyarakat pun akan lebih tinggi^[3]. Daerah yang memiliki masyarakat dengan pendapatan besar akan memiliki tingkat pengawasan politik yang tinggi oleh masyarakat, maka akan meningkatkan permintaan atas informasi kinerja pemerintah ^[11]. Rumus untuk mengukur Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut :

$$\text{Kesejahteraan Masyarakat} = \text{Ln PDRB perkapita} \quad (2.3)$$

Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah maka akan berdampak tinggi pula publikasi laporan keuangan daerah tersebut. Jika kesejahteraan disuatu daerah itu baik, maka kemampuan pola pikir masyarakatnya pun akan lebih maju dalam mengadopsi teknologi untuk mendapatkan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, informasi bisa didapatkan dengan mudah melalui pemanfaatan internet oleh masyarakat. Sehingga kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan ^[5,3] yang menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

H₄ : Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi pada *website* resmi pemerintah daerah

**Gambar 1
Kerangka Pemikiran**



2.2 Metodologi

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah informasi keuangan dari seluruh ibukota provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2017 yang berjumlah 68 data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logistik dengan menggunakan software SPSS versi 25. Rumus regresi logistik dalam penelitian ini sebagai berikut

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e \quad (2.4)$$

Keterangan :

- Ln $p/(1-p)$: Pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah
 Ln $p/(1-p) = 1$: Pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah
 Ln $p/(1-p) = 0$: Pemerintah daerah tidak mengungkapkan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah
 βX_1 : Kompleksitas pemerintah
 βX_2 : Tingkat kemandirian
 βX_3 : Kesejahteraan masyarakat
 e : Error/ kesalahan

3. Pembahasan

3.1 Karakteristik Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompleksitas Pemerintah	68	13.41	17.69	15.2590	1.02103
Tingkat Kemandirian	68	.04	.69	.1953	.12921
Kesejahteraan Masyarakat	68	16.59	19.24	17.6185	.55034
Pengungkapan Informasi Keuangan	68	0	1	.44	.500
Valid N (listwise)	68				

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan Pengujian Analisis Deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:

- Kompeksitas pemerintah pada tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 15,25 dan pada tahun 2017 sebesar 15,27. Nilai maksimum kompleksitas pemerintah pada tahun 2016 sebesar 17,67 dan pada tahun 2017 sebesar 17,69. Nilai minimum kompleksitas pemerintah pada tahun 2016 sebesar 13,41 dan pada tahun 2017 sebesar 13,45. Standar deviasi kompleksitas pemerintah pada tahun 2016 sebesar 1,03 dan pada tahun 2017 sebesar 1,03.
- Tingkat kemandirian pada tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 0,19 dan pada tahun 2017 sebesar 0,20. Nilai maksimum tingkat kemandirian pada tahun 2016 sebesar 0,69 dan pada tahun 2017 sebesar 0,68. Nilai minimum tingkat kemandirian pada tahun 2016 sebesar 0,04 dan pada tahun 2017 sebesar 0,05. Standar deviasi tingkat kemandirian pada tahun 2016 sebesar 0,13 dan pada tahun 2017 sebesar 0,13.
- Kesejahteraan masyarakat pada tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 17,58 dan pada tahun 2017 sebesar 17,65. Nilai maksimum kesejahteraan masyarakat pada tahun 2016 sebesar 19,16 dan pada tahun 2017 sebesar 19,24. Nilai minimum kesejahteraan masyarakat pada tahun 2016 sebesar 16,59 dan pada tahun 2017 sebesar 16,66. Standar deviasi kesejahteraan masyarakat pada tahun 2016 sebesar 0,55 dan pada tahun 2017 sebesar 0,55.
- Pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah pada tahun 2016 dan 2017 memiliki rata-rata sebesar 0,44 artinya terdapat 44% daerah yang telah melakukan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

3.2 Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik pada dasarnya sama dengan analisis diskriminan, perbedaan terletak pada jenis data dari variabel dependen^[2]. Pada analisis ini variabel dependen menggunakan skala nominal (variabel dummy). Analisis regresi logistik merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis ini tidak dibutuhkan asumsi normalitas data pada variabel independennya, regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi multivariat normal distribusi tidak terpenuhi

A. Pengujian Kelayakan Regresi

Hasil pengujian Hosmer and Lemeshow dengan probabilitas signifikan menunjukkan angka 0,127. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 sehingga H_0 diterima maka model penelitian ini dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

B. Model Fit

Nilai -2LogL pada langkah awal (block number = 0), dimana nilai konstantanya adalah sebesar 93,325. Sementara nilai -2LogL pada langkah selanjutnya (block number = 1), dimana nilai konstanta sebesar 74,075. Hal ini menunjukkan penurunan -2LogL pada langkah awal dan -2LogL pada langkah selanjutnya sebesar 19,25. Penurunan ini menunjukkan model regresi yang semakin baik, sehingga model regresi ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

C. Pengujian Simultan (*Omnibus Test of Model Coefficient*)

Pengujian secara simultan dalam regresi logistik menunjukkan nilai dari Chi-Square sebesar 20,394 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang berarti secara simultan variabel independen yaitu kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah

D. Koefisien Determinasi

Hasil pengujian dengan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,347 (34,7%) menunjukkan bahwa variabilitas variabel independen yaitu kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah sebesar 34,7% sisanya sebesar 65,3% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

E. Pengujian Parsial (Variabel in The Equation)

Tabel 2 Hasil pengujian parsial (Variabel in the equation)

Step 1 ^a		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
	Kompleksitas Pemerintah	1.065	.418	6.503	1	.011	2.900
	Tingkat Kemandirian	3.806	3.282	1.345	1	.246	44.989
	Kesejahteraan Masyarakat	-.333	.623	.284	1	.594	.717
	Constant	-11.378	13.342	.727	1	.394	.000

a. Variable(s) entered on step 1: Kompleksitas Pemerintah, Tingkat Kemandirian, Kesejahteraan Masyarakat.

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh :

1. Nilai Sig. dari kompleksitas pemerintah adalah 0,011 , dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikan (α) = 5% atau 0,05. Maka H_{a1} diterima, artinya terdapat pengaruh positif antara kompleksitas pemerintah dengan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.
2. Nilai Sig. dari tingkat kemandirian adalah 0,246 , dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai signifikan (α) = 5% atau 0,05. Maka H_{02} diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara tingkat kemandirian dengan pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.
3. Nilai Sig. dari kesejahteraan masyarakat adalah 0,594 , dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai signifikan (α) = 5% atau 0,05. Maka H_{03} diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

3.3 Pembahasan

A. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah

Hasil dari uji regresi logistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari $\alpha=5\%$ atau 0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel kompleksitas pemerintah secara parsial berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi kompleksitas pemerintah maka akan semakin tinggi pula pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerahnya. Terdapatnya jumlah penduduk yang banyak pada suatu daerah akan lebih mendorong pemerintah dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut, dibanding dengan daerah yang jumlah penduduk sedikit. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan pemerintah dilakukan untuk para penggunanya, salah satu pengguna laporan keuangan adalah masyarakat atau penduduk di suatu daerah. Dengan demikian kompleksitas yang tinggi dapat memberikan dorongan untuk pemerintah daerahnya untuk melakukan transparansi dengan meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ^[4] menyatakan bahwa kompleksitas pemerintah terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

B. Pengaruh Tingkat Kemandirian Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah

Hasil dari uji regresi logistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,246 lebih besar dari $\alpha=5\%$ atau 0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemandirian secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian yang tinggi tidak menjadi acuan pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan H3 yang dibangun oleh peneliti, yang menunjukkan hubungan positif signifikan antara tingkat kemandirian dengan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi tidak tentu juga akan melakukan pengungkapan informasi yang tinggi juga, artinya pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah tidak bergantung pada besarnya tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan maka akan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah telah berjalan dengan baik maka penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya sendiri semakin mandiri, sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengalami ketergantungan dari pihak eksternal menjadi rendah. Hal ini membuat pemerintah daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan informasi keuangan karena rendahnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari pihak eksternal. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian bukan acuan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan ^[8,11,4] yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

C. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah

Hasil dari uji regresi logistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,594 lebih besar dari $\alpha=5\%$ atau 0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan H4 yang dibangun peneliti, dimana adanya yang menunjukkan hubungan positif signifikan antara kesejahteraan masyarakat dengan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Padahal seharusnya masyarakat yang daerahnya lebih sejahtera akan lebih peduli terhadap jalannya pemerintah daerah, maka semestinya pengungkapan informasi keuangan daerah pada *website* resmi pemerintah daerah akan lebih diungkapkan seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya masyarakat produktif, maka masyarakat itu akan terdorong untuk memanfaatkan informasi teknologi semaksimal mungkin. Akan tetapi belum tentu masyarakat peduli terhadap keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah, seringkali masyarakat hanya peduli terhadap kepentingan pribadinya saja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ^[12] yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

4. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Sampel dari penelitian ini adalah informasi keuangan 34 provinsi yang ada di Indonesia selama dua tahun yaitu 2016 -2017, maka terdapat 68 data yang ada dalam penelitian ini. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kondisi keuangan, opini audit, kekayaan daerah dan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh secara simultan dan parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Secara simultan variabel independen yaitu kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompleksitas pemerintah yang berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik. (2019). Kependudukan [online]. Tersedia: [https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab1] [Diakses 21 Oktober 2019]
- [2] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan program *IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [3] Hasanah, U. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *JAI*.
- [4] Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol.22(1), 25-33.
- [5] Idris, A. L., Surasni, N.K., & Irwan, M. (2018). The Determinant Disclosure Of Internet Financial Reporting In District and City Government In Indonesia. *Int.J.Eco. Res*, Vol.9, 62-74.
- [6] Pandasari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, ISSN 1979-6471 *Volume* 19(3).
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi.
- [8] Prasasti, A. M., Rahayu, S., & Zultilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)* Vol. 9(2), 94-103.
- [9] Rahayu, A., & Mardiana, A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada LKPD Kabupaten/Kota Pada Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* : Vol. 1(1).
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- [11] Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 4(4), 1-12.
- [12] Yustikasari, Y. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada Website Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita*, Vol 11, No 1.